



BANTUAN TNI AL DI PELOSOK LEBAK

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) berbincang dengan warga saat pemeriksaan layanan kesehatan gratis di Bojong Manik, Lebak, Banten, Kamis (24/11). TNI Angkatan Laut (AL) memberikan bantuan berupa layanan kesehatan gratis, sembako, dan pembangunan gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatwa Gelebug dalam rangka mempercepat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di daerah pelosok Kabupaten Lebak.

KSAL Laksamana Yudo Bangun Madrasah di Pedalaman Lebak

KSAL Laksamana Yudo Margono cukup prihatin dengan sekolah MI Al Fatwa yang lokasinya di pedalaman Kabupaten Lebak dengan kondisi tidak layak untuk siswa dalam menerima proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Kondisi fasilitas dan infrastruktur bangunan perlu dilakukan perbaikan agar anak-anak dari kelas I sampai VI mengikuti pembelajaran dengan tenang dan nyaman, katanya.

LEBAK (IM)- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono membangun Madrasah

Ibtidaiyah (MI) Al Fatwa di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kegiatan itu dilakukan untuk kemajuan pendidikan di kawasan Lebak.

"Kami berharap anak-anak di sini memiliki ilmu pengetahuan yang baik sebagai generasi penerus," kata Yudo dalam peletakan batu pertama pelaksanaan pembangunan MI Al Fatwa di Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Kamis (24/11).

Yudo cukup prihatin sekolah MI Al Fatwa yang lokasinya di pedalaman Kabupaten Lebak dengan kondisi tidak layak untuk siswa dalam menerima proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Kondisi fasilitas dan infrastruktur bangunan perlu dilakukan perbaikan agar

anak-anak dari kelas I sampai VI mengikuti pembelajaran dengan tenang dan nyaman.

Bahkan, gedung sekolah madrasah tersebut menjadikan perhatian media melalui pemberitaan. Karena alasan itulah, Yudo sangat peduli untuk membantu pembangunan MI Al Fatwa guna mendorong anak-anak di sini dapat belajar dengan baik untuk mencetak generasi yang berkualitas.

Pendidikan, kata dia, sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Yudo pun bersama dengan pemerintah daerah setempat untuk pelaksanaan pembangunan gedung MI tersebut. "Kami berharap pembangunan gedung MI Al Fatwa itu berjalan lancar," katanya.

Kepala MI Al Fatwa, Nining mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada KSAL yang membangun gedung MI. Sehingga anak-anak terkonsentrasi belajar penuh tanpa ketakutan bangunan roboh.

Saat ini, kata dia, pihaknya pengelola madrasah dan puluhan siswa merasa senang peletakan batu pertama dihadiri KSAL Yudo Margono didampingi Pj Gubernur Banten, Al Muktabar dan Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi. "Kami mengapresiasi kepedulian Bapak KSAL membangun gedung sekolah MI Al Fatwa itu, sehingga anak-anak belajar merasa nyaman untuk menimba ilmu," katanya. **● pra**

Pemkot Serang Buka Lelang Jabatan Kepala OPD

SERANG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang telah membuka lelang jabatan atau open bidding kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Empat kepala OPD yang kosong yakni, Kepala BK-PSDM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahragra atau Disparpora dan Sekretaris DPRD Kota Serang.

Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi menegaskan agar proses pemilihan pejabat eselon II tidak berdasarkan kedekatan atau pertemanan (nepotisme).

"Saya harap wali kota jangan berdasarkan kedekatan atau pertemanan, karena beliau mantan birokrasi," tegasnya, Kamis (24/11).

La mengatakan, pemilihan kepala dinas harus berdasarkan gagasan program kerja sesuai dengan tupoksi pada dinas masing-masing.

"Saya harap wali kota tidak sembarang pilih, ini kesempatan yang masuk tiga besar dievaluasi satu-satu, presentasikan pleningnya," katanya.

Sebab yang sudah terjadi, ada pejabat di Dindik dan Dishub dinilai tidak memiliki progres serta nampak tak menguasai tugas dan fungsi.

"Kejadian banyak tidak bekerja, seperti Dishub, Dindik, hingga tidak mengerti tupoksinya sendiri," ungkapnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Serang tidak boleh salah pilih pejabat agar pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik.

"Wali Kota untuk tidak salah pilih orang lagi, cari orang yang bisa memenuhi kerja di dinas masing-masing sesuai dengan tupoksinya," paparnya. **● pra**

Awat! ETL ETL Akan Mulai Berlaku di Tangsel

TANGSEL (IM)- Polres Tangerang Selatan (Tangsel) akan mulai memberlakukan aturan baru Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sebagai pengganti tilang manual secara bertahap.

Aturan tersebut berdasarkan instruksi Kapolri, Jenderal Listy Sigit Prabowo mengularkan larangan menggelar tilang secara manual yang tertuang dalam surat telegram nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 per 18 Oktober 2022.

Kasat Lantas Polres Tangsel, AKP Dicky Dwi Priambudi Anif Sutarnan meminta agar masyarakat selalu taat ketika berlalu lintas meski tak ada lagi tilang manual. "Pada Operasi Patuh 2022 ini, sanksi tilang hanya diterapkan lewat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)," ujar Dicky, Kamis (24/11).

Adapun penegakan hukum dilakukan dengan dua cara, yakni dengan tilang, baik itu dengan elektronik statis melalui kamera pada titik-titik tertentu. Selain itu dengan cara mobile, di mana petugas Polantas yang berpatal akan memotret pengendara yang melanggar sebagai barang bukti ETL.

Dicky berharap, semua masyarakat Tangsel dapat mematuhi peraturan Lalu Lintas dan patuhi tata tertib berlintas dalam berkendara. "Masyarakat patuh taat ketika berlalu lintas agar dapat tercipta keamanan dan keselamatan bersama," tukas Dicky. **● pp**



KORBAN SELAMAT DARI RERUNTUHAN AKIBAT GEMPA CIANJUR

Azka (6), korban selamat setelah dua hari tertimpa reruntuhan akibat gempa bumi magnitudo 5,6 dirawat di RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (24/11). Azka ditemukan selamat oleh relawan setelah dua hari terjebak reruntuhan di rumah orang tuanya yang ambruk akibat gempa bumi magnitudo 5.6 di Kabupaten Cianjur.

Eks Sekretaris Disdikbud Banten Dituntut 7 Tahun Penjara

SERANG (IM)- Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten, Ardius Prihantono dituntut dengan pidana penjara 7 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan tanah untuk gedung SMKN 7 Tangerang Selatan.

Ardius telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melalui korupsi pengadaan tanah sehingga merugikan keuangan negara Rp 10,5 miliar. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardius Prihantono dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda Rp 200 juta subsidi pidana kurungan enam bulan," kata jaksa KPK, Asri Irawan saat membacakan berkas tuntutan di hadapan Ketua Majelis Hakim, Atep Sopandi di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (24/11). Selain Ardius, jaksa juga menuntut terdakwa lainnya yakni dari pihak swasta, Agus Kartono dengan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda Rp 300 juta subsidi satu tahun. Kemudian terdakwa Farid Nurdiansyah dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidi 6 bulan pidana urungan.

Asri menyebutkan, ketiga terdakwa juga diberikan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 414 juta kepada Ardius, dengan ketentuan apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Terdakwa Agus diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 6,2 miliar, dengan ketentuan jika membayar maka dihukum selama 5 tahun. "Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Farid Nurd-

Pemkot Tangerang Kirim Bantuan Personel dan Uang ke Cianjur

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota Tangerang mengirimkan personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta bantuan uang sebesar Rp 200 juta untuk membantu korban bencana alam gempa bumi di wilayah Cianjur, Jawa Barat.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah di Tangerang Kamis (24/11) mengatakan jumlah personel yang dikirim ke Cianjur ada 20 orang dari tim BPBD Kota Tangerang. "Hari ini kita melakukan apel pelepasan rekan-rekan BPBD yang akan melakukan tugas kemanusiaan, untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam di Cianjur Jawa Barat," kata Wali Kota Arief.

Arief juga meminta kepada personel yang akan bertugas untuk bisa optimal dalam membantu dan mengevakuasi

korban bencana alam gempa bumi masyarakat Cianjur. "Kalau kita lihat di media, masyarakat di sana masih butuh bantuan, bahkan masih ada gempa susulan informasinya, banyak akses jalan yang terputus ke lokasi kejadian. Lakukan tugas-tugas kalian dengan penuh dedikasi, kerja dengan baik dan jaga kesehatan," imbuhnya.

Ia menjelaskan, para petugas akan ditempatkan di posko Kecamatan Pacet Cianjur, dan membawa lima armada di antaranya dua unit truk, satu mobil pemadam kebakaran, satu ambulans dan mobil komando.

"Ada bantuan sedekah juga dari teman-teman pegawai, kurang lebih Rp 200 juta mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, minimal bisa membantu meringankan kebutuhan mereka," ujarnya. **● pp**

Pemkot Tangsel Kaji Penanganan Masalah Perhubungan dan Lalu Lintas

TANGSEL (IM)- Perkembangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, yang semakin cepat, menuntut diperlukannya konsep maupun master plan dalam penanganan lalu lintas maupun persoalan perhubungan.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie saat membuka kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kota Tangsel, kemarin. Benyamin mengutarakan peranan Dinas Perhubungan sebagai ujung tombak pemerintahan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan perhubungan di Kota Tangsel.

Untuk itu harus dilakukan kolaborasi, komunikasi terhadap sektor-sektor yang punya keterkaitan dengan persoalan perhubungan maupun jalan. "Memang problematiknya di dalam Tangsel ini kan ada urusan jalan provinsi, ada jalan nasional. Mari kita coba urai seluruh persoalan perhubungan," kata Benyamin. Persoalan yang ada di Tangsel ini adalah tantangan bagi seluruh elemen pemerintahan untuk saling bahu membahu menyelesaikan persoalan yang ada. Dengan tatanan konsep yang teratur berdasarkan kajian dan studi kelayakan akan memberikan pelayanan publik yang optimal.

"Misal pertambahan penduduk di Tangsel, dengan adanya jalan tol yang baru Serpong Cijere Bandara, belum lagi Balajara Serpong dan seterusnya, ini jadi menambah traffic kita semakin tinggi dan menambah kendaraan pribadi," ungkapnya.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam jangka pendek, maupun jangka panjangnya. "Ikuti RPJMD nya, jadi saya minta ada master plannya untuk soal lalu lintas, perhubungan, untuk jangka waktu yang lama. Saya berharap forum lalu lintas ini menghasilkan perspektif mewakili pemerintah kota, ada kebijakan yang dapat dilahirkan," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangsel, Chaerudin mengatakan kegiatan ini untuk mengakomodir maupun menginventarisir mencari solusi dari permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan lalu lintas dan perhubungan. Dengan tujuan untuk kepentingan keselamatan berkendara di Tangerang Selatan.

"Diperlukan strategi dan langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk pengaturan lalu lintas secara optimal. Melalui Dishub sebagai wadah evaluasi periodik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan tujuan peningkatan pelayanan lalu lintas," pungkasnya. **● pp**

Masih Banyak Warga Pandeglang yang Tinggal di Gubuk Reot

PANDEGLANG (IM)- Kesenjangan sosial di Kabupaten Pandeglang sangat mengkhawatirkan. Hal itu terlihat dari banyaknya warga Pandeglang yang tinggal di gubuk reot.

Seperti yang terjadi di Desa Cibungir, Kecamatan Sukaresmi, ada salah seorang kakek-kakek yakni Narmin (60) yang tinggal di gubuk bekas kandang kambing, lantaran tak mampu membangun rumahnya yang ambruk.

Hal serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Menes, warga yang rumahnya ambruk dan harus tinggal di gubuk reot karena tak punya biaya untuk membangun kembali rumahnya.

Selain itu, nenek Simot warga Kecamatan Patia, yang juga tinggal di rumah yang jauh dari kata layak huni. Kemudian warga Kiceudal yang lumpuh sejak kecil dengan hidup serba keterbatasan ekonomi.

Belum lagi, beberapa waktu lalu ada sejumlah warga yang sakit terpaksa harus ditandu dengan kain sarung oleh warga, lantaran akses jalan menuju fasilitas kesehatan (faskes) rusak berat dan tidak bisa dilalui kendaraan.

Atas kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Banten, Uday Suhada menyinggung soal program sepeda listrik Bupati Pandeglang tahun 2023 yang menelan anggaran sebesar Rp 38 miliar.

"Masih kan Bupati Irna mau memaksakan program sepeda listrik, di tengah mengkhawatirkannya kesenjangan sosial di Pandeglang. Kalau tetap diteruskan sepeda listrik ini, berarti Dzolim," ungkap Uday, Kamis (24/11).

Menurut dia, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Bupati Pandeglang ingin memaksakan program sepeda listrik untuk para RT dan RW, tak peduli kebutuhan mendasar rakyatnya, baik infrastruktur jalan, kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan serta ekonomi masyarakat.

"Bahkan dengan jumaranya saat memaksakan kehen-dak membeli sepeda listrik itu, Bupati Irna menyatakan bahwa uang Rp38 miliar itu kecil bagi dirinya," katanya.

Sebagai warga Pandeglang lanjut Uday, ia mengaku sangat malu, setiap ada pemberitaan di media nasional dari waktu ke waktu. Beritanya tak jauh dari pasien ditandu untuk berobat,

dan terus berulang.

"Fakta ini menunjukkan kegagalan kepemimpinan. Dulu kategorinya sekadar masyarakat miskin terbanyak, kini malah menjadi miskin ekstrem," ujarnya.

Apalagi tambah Uday, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Banten, yang menyebutkan jumlah penduduk miskin ekstrem berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dihimpun PK21, BPS maupun Kemensos.

ang mana warga yang masuk kategori miskin ekstrem ini, kondisinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi.

"Angka kemiskinan ekstrem terbanyak di Provinsi Banten, secara persentase berada di Kabupaten Pandeglang. Di mana dari total jumlah penduduk Pandeglang pada 2020 yang mencapai 1.272.687 orang, hampir 50 persennya masuk dalam kategori miskin ekstrem individu atau sekitar 597.504 orang," bebernya. **● pra**



PENYEGELAN RESTORAN TAK BERIZIN DI KOTA BOGOR

Sejumlah anggota Satpol PP Kota Bogor bersiap menyegel salah satu restoran di Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/11). Penyegelan restoran dilakukan karena belum memiliki sejumlah perizinan sesuai dalam Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan.